

JURNAL

**PERTIMBANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR DALAM
PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR BESI
OPERASI PRODUKSI 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/XI/2011**
(Studi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat - Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ARYO NUGROHO
NIM 0910110012



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Artikel : **PERTIMBANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR BESI OPERASI PRODUKSI 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/XI/2011 (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar)**

Identitas penulis :

a. Nama : **ARYO NUGROHO**

b. NIM : **0910110012**

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka Waktu Penelitian : **5 Bulan**

Disetujui tanggal : 15 Januari 2013,
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum
NIP. 1960.0810.198601.1.1002

Agus Yulianto S.H. M.H
NIP1959.0717.198601.1.001

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum
NIP. 1960.0810.198601.1.1002

ABSTRAKSI

ARYO NUGROHO, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, pertimbangan pemerintah daerah kabupaten blitar dalam pemberian izin usaha pertambangan pasir besi operasi produksi 503/007/iup-perpanjangan/409.304/xi/2011(studi di dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar),Lutfi Effendi,SH.MHUM dan Agus Yulianto, SH,MH

Meningkatnya harga pasir besi di pasaran internasional telah menarik perhatian beberapa perusahaan untuk melakukan eksploitasi dan produksi. Pantai Jolosutro di kecamatan Wates kabupaten Blitar akhirnya dijadikan sebagai kawasan pertambangan. Dengan mengacu pada UU no.32 tahun 2004, UU no.4 tahun 2009, PP no.38 tahun 2007, Peraturan Kementrian Lingkungan no.11 tahun 2006, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar tahun 2004-2014 dan tahun 2009-2028, IUP diberikan kepada Edi Sampurna. Namun keluarnya Perda no.5 tahun 2009 yang menyatakan pantai Jolosutro sebagai kawasan wisata membuat timbulnya aksi penolakan terhadap kegiatan pertambangan. Rusaknya lingkungan pantai akibat aktivitas pertambangan yang membuat menurunnya hasil tangkapan nelayan dan berkurangnya penghasilan pedagang akibat menurunnya jumlah wisatawan melatarbelakangi warga sekitar pantai Jolosutro menuntut untuk menutup aktivitas pertambangan.

Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar mengeluarkan ijin pertambangan adalah adanya peraturan yang menjelaskan mengenai kewenangan pengeluaran ijin pertambangan dan terdapatnya kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Blitar baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun peraturan yang menguatkan dasar pertimbangan tersebut adalah UU no.32 tahun 2004, UU no.4 tahun 2009, PP no.38 tahun 2007 dan Peraturan Kementerian Lingkungan no.11 tahun 2006. Keluarnya ijin tersebut juga atas pertimbangan ekonomi, yaitu terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun dari segi sosial adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar pantai Jolosutro, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang. Namun, pada jangka panjang dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya rusaknya lingkungan sekitar pantai Jolosutro, semakin menipis hingga habisnya komoditas pasir besi sehingga akan terjadi pemberhentian pekerja dalam skala besar serta terkikisnya dataran yang dimiliki Kabupaten Blitar sehingga terjadi penyempitan lahan.

Kata Kunci : Implementasi,Ijin usaha pertambangan,Pasir Besi

ABSTRACT

ARYO NUGROHO, State Administrative Law, Faculty of Law, UB, in January 2013, the local government Blitar consideration in granting mining license 503/007/iup-perpanjangan/409.304/xi/2011 iron sands production operations (studies department of Human Settlements and Public Works Spatial Blitar), Lutfi Effendi, SH.MHUM and Agus Yulianto, SH, MH

The increasing price of iron sand in the international market has attracted the attention of several companies in the exploitation and production. Jolosutro Beach counties in the district Wates Blitar eventually serve as the mining areas. With reference to the Law no.32 of 2004, Act no.4 of 2009, PP no.38 of 2007, the Ministry of Environmental Regulation No.11 of 2006, the Spatial Plan (Spatial Plan) Blitar years 2004-2014 and 2009 - 2028, IUP was given to Eddie Sampurna. But a decision No.5 of 2009 which states Jolosutro coast as a tourist area makes the onset of action of objections against mining activities. Damage to the coastal environment due to mining activities which create reduced the catch of fishermen and traders reduced income due to decreasing number of tourists around the coast Jolosutro behind residents sue to shut down mining activities.

Results of research conducted to explain the rationale Blitar Local Government issued a mining permit is the regulatory authority of the issuance of permits to explain the presence of mines and Blitar RTRW compliance with both short and long term. The rules are basic considerations reinforce Act no.32 of 2004, Act no.4 of 2009, PP no.38 of 2007 and the Ministry of the Environment Regulations no.11 of 2006. Discharge permit also on economic considerations, namely the increase in social welfare. The social aspect is the opening of new jobs for the surrounding community Jolosutro coast, so that unemployment and poverty can be reduced. However, the long term impact is the environment around the coast Jolosutro kerusaknya, dwindling commodity to endless grit and causes dismissal of workers on a large scale as well as the erosion of land that is owned Blitar resulting in narrowing of the land.

Keywords: Implementation, mining permits, Iron Sand

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Blitar memiliki potensi tambang Golongan B dan C sangat menjanjikan terutama terdapat di Wilayah Blitar Selatan apabila dapat di manfaatkan dan dikelola secara maksimal. Deposit bahan tambang tersebut meliputi : pasir besi, trass, bentonit, kaolin, feldspar, zeloit, ballclay, sirtu, batu kapur, andesit dan pirophiliyt. Salah satu kawasan dengan bahan tambang berlimpah adalah pantai Jolosutro yang berlokasi di kecamatan. Pantai Jolosutro memiliki kandungan bahan galian berupa pasir besi yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen.

Seiring meningkatnya harga pasir besi di pasaran internasional yang mencapai Rp 350.000/ton, kawasan pantai Jolosutro menjadi semakin diminati para pengusaha tambang. Atas dasar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar tahun 2004-2014 dan tahun 2009-2028, pemerintah kabupaten Blitar membuka pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perseorangan dengan mengacu pada ketentuan UU no.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Kementrian Lingkungan no.11 tahun 2006¹.

Lelang akhirnya dimenangkan oleh Edi Sampurna dan berhak mengurus Izin Usaha Pertambangan di Dinas Pertambangan Umum Karya Cipta dan Tata Ruang kabupaten Blitar. Pada tanggal 9 Maret 2007, Dinas Pertambangan Umum Karya Cipta dan Tata Ruang kabupaten Blitar memberikan IUP kepada Edi Sampurna dan di perpanjang pada tahun 2011 dengan masa pertambangan hingga 2017. Dengan ketentuan yang berlaku, Edi Sampurna akhirnya mendapatkan hak penuh untuk melakukan aktivitas pertambangan dan produksi pasir besi.

Aktivitas pertambangan yang telah berjalan beberapa tahun tersebut akhirnya mengalami penolakkan dari warga sekitar pantai Jolosutro yang berprofesi sebagai nelayan. Rusaknya lingkungan disekitar pantai telah menyebabkan hasil tangkapan menurun dan wisatawan enggan berwisata di salah satu pantai kabupaten Blitar tersebut. Dengan munculnya Perda no.5 tahun 2009, aksi penolakkan pertambangan

¹ Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pertambangan Umum pada tanggal 28 September 2012 di kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar

semakin didukung oleh beberapa LSM. Atas dasar isi Perda tersebut yang menyatakan pantai Jolosutro sebagai kawasan wisata, mereka menuntut penutupan kegiatan pertambangan dan melakukan pengkajian ulang terhadap dampak lingkungan².

Akhirnya, pemerintah daerah kabupaten Blitar memerintahkan Edi Sampurna untuk menutup sementara aktivitas pertambangannya hingga proses hukum dan pengkajian kembali selesai dilakukan. Penutupan tersebut ternyata merugikan para pekerja tambang. Sehingga, aksi demonstrasi dengan menggandeng LSM terjadi untuk menuntut pemerintah daerah membuka kembali aktivitas pertambangan. Munculnya kelompok pro dan kontra tersebut akhirnya menuntut pemerintah daerah kabupaten Blitar untuk mempercepat proses hukum dan pengkajian ulang terhadap aktivitas pertambangan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari kejadian yang tertulis diatas maka terdapat 2 masalah yang ingin diketahui jawabannya, yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah Kabupaten Blitar dalam memberikan izin pertambangan pasir besi operasi produksi 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/XI/2011 di Pantai Jolosutro, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar ?
2. Apakah dampak yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya izin pertambangan pasirbesi operasi produksi 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/XI/2011 di Pantai Jolosutro, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar ?

C. METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis atau dapat pula disebut penelitian lapang. Penelitian ini

² Soal Pertambangan Pasir Besi Perlu Dikaji Ulang Bupati Blitar(online)www.korantransaksi.com (10 januari 2013)

mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Dengan cara mendasarkan pada peraturan- peraturan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan³.

Penelitian ini secara umum menganalisa kebijakan pemerintah daerah kabupaten Blitar di bidang pertambangan dan terkhusus pada pertimbangan pemberian izin pertambangan pasir besi di Kabupaten Blitar. Penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan gambaran tentang fakta – fakta yang ada yang diperoleh di lapangan maupun dari studi kepustakaan. Tetapi setelah dipelajari ketentuan hukumnya dan diteliti di lapangan, diadakan analisa untuk memperoleh faktor pemberian izin dan hambatannya serta dampak yang ditimbulkan dengan berjalannya impleentasinya.

Penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang didapat dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi di lokasi penelitian, yaitu pantai Jolosutro kecamatan Wates kabupaten Blitar dan Dinas Pertambangan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang serta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi yang mengeluarkan IUP.

D. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan

Meningkatnya harga pasir besi di pasaran hingga Rp 350.000,-/ton telah berakibat pada upaya kegiatan pertambangan oleh beberapa perusahaan pertambangan. Kawasan pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar yang memiliki kandungan pasir besi, akhirnya menjadi perebutan beberapa perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Salah satu perusahaan yang menginginkan potensi bahan tambang pantai Jolosutro adalah Edi Sampurna. Edi Sampurna merupakan perseorangan yang berhasil mendapatkan ijin kegiatan penambangan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi serta Kantor Pelayanan

³ pojokhukum.com.tipologi-penelitian-hukum.html (1 oktober 2012)

Terpadu Satu Atap atas dasar pertimbangan Dinas Pertambangan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar sejak 9 Maret 2007.

Pantai Jolosutro ditetapkan menjadi kawasan pertambangan. Status kawasan pertambangan pantai Jolosutro tersebut tertuang dalam RTRW Kabupaten Blitar tahun 2004-2014 bab V halaman 53 tentang Kawasan Pertambangan yang menyebutkan bahwa *“kawasan-kawasan potensial untuk pengembangan pertambangan jenis pertambangan pasir besi, yaitu di Pantai pasir Kecamatan Bakung dan Pantai Jolosutro di Kecamatan Wates”*. Status kawasan pertambangan di Pantai Jolosutro Kecamatan Wates juga tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 20 tahunan Kabupaten Blitar 2008-2028, yang menyebutkan hal yang serupa.

Berdasar UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP no.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, potensi pertambangan yang ada di pantai Jolosutro merupakan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, Bupati Kabupaten Blitar memiliki kewenangan untuk memberikan izin pertambangan, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi selama masih berada di wilayah pemerintahannya atau sampai dengan 4 mil laut apabila berada di wilayah pesisir atau pantai. Kewenangan untuk pemberian izin pertambangan juga tercantum pada UU no.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara jelas, pada pasal 8 dituliskan *“kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil”*

Berdasar Undang-Undang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut maka Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Blitar atas dasar pertimbangan Dinas Pertambangan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mengeluarkan dan mengesahkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk kepemilikan perseorangan

Edi Sampurna dengan nomor surat 503/002/IUP/409.304/IV/2011 dan diperpanjang dengan nomor surat 503/007/IUP-Perpanjangan/409.304/XI/2011. Keputusan ijin pertambangan juga dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Blitar dalam bentuk Surat Ijin Pertambangan Umum (SIPU) no.545/SIPU/04/409.113/2007 dengan kepemilikan perseorangan Edi Sampurna. Keluarnya surat ijin tersebut membuat Edi Sampurna memiliki hak untuk melakukan pertambangan di pantai Jolosutro.

Berdasar kelengkapan dan prosedur administratif, pemohon (Edi Sampurna) dapat dinyatakan sah. Hal ini dikarenakan pemohon dapat melengkapi persyaratan untuk melakukan pertambangan beserta lampiran Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Survey Perilaku Peduli Lingkungan (SPPL). Meskipun tidak melampirkan analisis dampak lingkungan (Amdal), pemohon dianggap sah dan dapat memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Kementrian Lingkungan no.11 tahun 2006, karena pada peraturan tersebut syarat permohonan usaha pertambangan hanya melampirkan UKL-UPL atau SPPL atau Amdal. Pemohon juga dianggap mampu melaksanakan usaha pertambangan karena memiliki tenaga teknik pertambangan atau geodesi. Pemohon juga menyatakan mampu mentaati dan menjalankan 8 ketentuan SIPU serta membayar pajak dan retribusi kepada daerah⁴.

Harga pasir besi yang tergolong mahal akan memberikan kontribusi pajak yang besar bagi Kabupaten Blitar. Untuk pendapatan pada retribusi dari pertambangan tersebut, pemerintah daerah menetapkan Rp 70.000/ha. Besaran retribusi yang di pungut tersebut sesuai dengan UU no.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui kegiatan penambangan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Blitar juga akan mendapat kompensasi dari hasil pengangkutan pasir besi yang jumlah atau besarnya Rp 350.000/rit truk. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pertambangan tersebut, maka Kabupaten Blitar dapat melakukan pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan daerahnya dengan lancar. Hal ini akan

⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pertambangan Umum pada tanggal 28 September 2012 di kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar

berdampak pada kesuksesan Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya untuk mensejahterakan warganya.

Pemerintah daerah juga memiliki sebuah pemikiran, apabila izin pertambangan tersebut dikeluarkan, maka masyarakat sekitar pantai Jolosutro akan dapat diberdayakan. Lapangan pekerjaan baru akan terbuka, masyarakat dapat menjadi pekerja disebuah pertambangan baru di Jolosutro dengan gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) atau bahkan lebih, mengingat pasir besi sangat dibutuhkan pasaran internasional. Selain menjadi pekerja di perusahaan pertambangan, masyarakat sekitar juga dapat menjadi pedagang yang mencukupi kebutuhan pekerja tambang, seperti membuka warung makan, jasa bengkel, jasa parkir dan lain sebagainya. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah sekaligus dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan kabupaten⁵.

Namun, hal berbeda berkaitan dengan status pantai Jolosutro tercantum pada Peraturan Daerah no.5 tahun 2009 pasal 63 ayat 3(a) yang menyebutkan pantai Jolosutro merupakan kawasan wisata. Ijin pertambangan yang telah keluar dan disahkan tersebut akhirnya menjadi sorotan warga Kabupaten Blitar. Aksi protes tentang penutupan pertambangan tersebut akhirnya terjadi hingga muncul aksi teror antara kelompok pro dan kontra. Kepala Seksi Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Umum Cipta Karya dan Tata, M.Nur Hidayat menjelaskan bahwa sebenarnya keluarnya Peraturan Daerah (Perda) tersebut cacat hukum. Hal ini dikarenakan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta belum mengesahkan Peraturan Daerah tersebut. Keluarnya Perda no.5 tahun 2009 juga dianggap prematur, karena disusun dengan waktu yang terbatas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga, Perda tersebut dijadikan acuan yang salah oleh masyarakat mengenai status pantai Jolosutro.

Kegiatan pertambangan yang ada dipantai Jolosutro kecamatan Wates sebenarnya merupakan kegiatan yang sah dan di legalkan oleh hukum. Adapun

⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Blitar pada tanggal 28 September 2012 di kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar

hukum yang menaungi pertambangan tersebut adalah UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU no.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , PP no.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kementrian Lingkungan no.11 tahun 2006, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar tahun 2004-2014 dan tahun 2009-2028. Sedangkan Perda no.5 tahun 2009 yang dijadikan dasar masyarakat untuk menutup kegiatan pertambangan adalah peraturan yang salah dalam pengesahan karena beberapa faktor⁶.

Dampak Pemberian Izin Pertambangan di Kabupaten Blitar

Setiap tindakan, keputusan atau kebijakan yang dibuat dan diterapkan pasti akan menimbulkan dampak pada sasaran yang dituju hingga lingkungan sekitarnya. Hal ini juga termasuk pada keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar mengenai izin usaha pertambangan di pantai Jolosutro oleh Edi Sampurna. Kegiatan pertambangan yang telah dilakukan dari tahun 2007 dan akan berakhir pada tahun 2017 tersebut telah menimbulkan beragam dampak, baik dampak yang telah terjadi (jangka pendek) maupun dampak yang diperkirakan akan terjadi (jangka panjang). Dampak yang ditimbulkan tersebut tidak hanya terjadi pada 1 sektor saja (ekonomi), melainkan juga akan terjadi pada sektor-sektor yang lain, seperti lingkungan, sosial, politik hingga geografis. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bernilai positif bagi masyarakat, pemilik pertambangan dan pemerintah daerah, namun juga terdapat dampak yang bernilai negatif dan merugikan bagi masyarakat, pemerintah daerah dan pemilik usaha pertambangan.

Dampak Jangka Pendek

Dampak yang telah dirasakan dari keluarnya surat izin pertambangan pasir besi di pasir Jolosutro tersebut, umumnya terjadi pada sektor ekonomi. Dengan adanya pertambangan di pantai Jolosutro ini, pemerintah daerah Kabupaten Blitar mengalami

⁶ Ibid.

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya disektor pertambangan. Tercatat pada tahun 2011, pemerintah Kabupaten Blitar mendapat Rp 262 juta dari sektor pertambangan. Permintaan pasir besi di pasaran internasional telah menjadikan pasir besi sebagai komoditas yang memiliki harga jual yang tinggi. Harga 1 ton pasir besi saat ini diperkirakan Rp 350.000. Harga ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari harga sebelumnya yang sebesar Rp 63.000 hingga Rp 250.000 per ton pada tahun 2007 hingga 2010. Dengan melonjaknya harga pasir besi tersebut, maka pajak yang diberikan kepada pemerintah daerah juga meningkat. Pemerintah Kabupaten Blitar juga mendapat retribusi sebesar Rp60.000/ha dan biaya kompensasi sebesar Rp 350.000 per rit dari aktivitas pertambangan tersebut. Meskipun demikian, retribusi, pajak dan kompensasi yang dibayarkan dari usaha pertambangan pasir besi ini tidak terlalu besar⁷.

Dampak dari segi ekonomi yang telah terjadi berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran masyarakat di sekitar pantai Jolosutro. Izin pertambangan yang dikeluarkan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi serta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap atas rekomendasi Dinas Pertambangan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang ini telah menciptakan sebuah lapangan kerja baru di daerah pantai Jolosutro. Usaha pertambangan yang membutuhkan pekerja sangat banyak ini telah menyerap beberapa masyarakat sekitar pantai Jolosutro untuk jadi pekerja di pertambangan maupun pedagang yang memenuhi kebutuhan para pekerja. Dengan gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Blitar bahkan ada yang mendapat lebih, dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Adanya usaha pertambangan pasir besi ini telah memberdayakan masyarakat sekitar. Bahkan, bekerja di pertambangan pasir besi ini telah menjadi penghasilan utama yang diandalkan oleh masyarakat sekitar pantai Jolosutro. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar dan sumber pendapatan masyarakat sekitar meningkat.

⁷ Ibid.

Dampak positif dari sektor ekonomi dari usaha pertambangan ternyata tidak dialami oleh seluruh masyarakat di sekitar pantai Jolosutro. Beberapa kelompok masyarakat justru mengeluhkan keluarnya izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan pedagang di wilayah pariwisata pantai Jolosutro. Aktivitas pertambangan telah membuat ekosistem laut di sekitar pantai Jolosutro mengalami perubahan. Hewan-hewan laut terutama ikan, mulai meninggalkan pantai Jolosutro untuk mencari tempat lain yang lebih nyaman untuk berkembang biak. Aktivitas pertambangan memang selalu menghasilkan sebuah limbah yang merusak ekosistem laut, sehingga nelayan di pantai Jolosutro mengalami penurunan penangkapan. Nelayan harus berlayar agak jauh ketengah dengan menghadapi ombak yang lebih besar untuk mendapatkan tangkapan yang memuaskan.

Hal serupa juga dirasakan oleh para pedagang di kawasan wisata pantai Jolosutro. Intensitas lalu lintas kendaraan proyek yang tinggi telah merusak akses untuk menuju kawasan wisata, sehingga pengunjung pantai Jolosutro kurang berminat untuk berlibur di salah satu pantai yang dimiliki Kabupaten Blitar ini. Akhirnya pendapatan yang mereka terima mengalami penurunan, sehingga pemenuhan kebutuhan keluarga terasa semakin berat.

Keluarnya izin pertambangan untuk Edi Sampurna juga berakibat negatif pada stabilitas politik Kabupaten Blitar. Adanya pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan dengan kekuatan massa yang sama kuat telah menyebabkan situasi pro dan kontra. Kedua massa tersebut terus melakukan aksi dengan berdemonstrasi dan penutupan jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi yang dilakukan kedua massa ini menyebabkan *positioning* pemerintah daerah Kabupaten Blitar menurun. Bayangan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui usaha pertambangan ini ternyata tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat di sekitar pantai Jolosutro.

Dampak Jangka Panjang

Dampak yang telah terjadi akibat keluarnya izin pertambangan dan kegiatan pertambangan pasir besi di pantai Jolosutro ini, apabila terus dibiarkan maka akan

menghasilkan dampak-dampak yang lain. Umumnya dampak yang akan terjadi memiliki nilai negatif yang cukup besar bagi masyarakat, pemerintah dan pemilik usaha. Salah satunya adalah dampak negatif pada segi sosial dan politik. Apabila persengketaan pro dan kontra mengenai keberlanjutan pertambangan tersebut lama atau tidak dapat diselesaikan bahkan hingga mencapai jalan buntu atau tidak mencapai titik temu, maka massa yang sama-sama kuat ini akan terus melakukan aksi yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Lebih bahayanya, kelompok pro dan kontra tersebut saling melemahkan dengan tindakan saling serang hingga terjadi bentrokan antara kedua kelompok massa. Apabila ini terjadi maka akan banyak masyarakat yang terluka hingga kehilangan nyawa karena kesalahan keputusan pemerintahnya sendiri.

Selain itu yang akan ditimbulkan apabila pertambangan ini terus terjadi adalah kerusakan alam, terutama ekosistem laut sekitar dan pantai Jolosutro. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya pada dampak jangka pendek, kerusakan lingkungan pantai Jolosutro akan semakin parah hingga menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem. Potensi pariwisata dan hasil laut Kabupaten Blitar akan berkurang atau bahkan hilang akibat kegiatan eksplorasi yang terlalu berlebihan dan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Saat ini, beberapa negara berpandangan, komoditas pertambangan terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan primadona sumber pendapatan negara atau daerah. Namun, semua negara sepakat bahwa potensi tersebut tidak dapat diandalkan untuk jangka panjang. Suatu saat sumber daya alam yang berjumlah terbatas ini akan habis dan meninggalkan sederet kerugian hingga kekecewaan. Pandangan tersebut juga akan terjadi di Kabupaten Blitar apabila aktivitas pertambangan terus berlangsung. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan Edi Sampurna akan semakin mengurangi jumlah pasir besi di pantai Jolosutro. Saat Pasir besi semakin menipis dan habis, maka aktivitas pertambangan akan selesai dan berhenti, sehingga para pekerja juga harus diberhentikan. Dengan demikian, angka pengangguran masyarakat di sekitar pantai Jolosutro akan kembali tinggi. Masyarakat juga tidak dapat kembali ke pekerjaan awal mereka sebagai nelayan dan pedagang di

kawasan wisata pantai Jolosutro, karena ekosistem laut dan keindahan alam pantai Jolosutro telah berubah.

Perubahan secara geografis juga akan sedikit terpengaruh oleh aktivitas pertambangan yang berlangsung. Pengerukan pasir besi secara besar akan menyebabkan terkikisnya dataran yang dimiliki Kabupaten Blitar. Kawasan pemerintahan Kabupaten Blitar akan semakin menyempit, sehingga ruang untuk warga Kabupaten Blitar akan semakin berkurang. Potensi terjadinya bencana alam juga dapat dimungkinkan terjadi, seperti gempa bumi dan lain sebagainya. Hal ini mengingat beberapa aktivitas pertambangan di Indonesia telah menyebabkan beberapa fenomena alam yang tidak diinginkan seperti penambangan gas alam yang dilakukan PT.Minarak Lapindo yang berujung keluarnya semburan lumpur dalam jumlah yang besar dan beberapa aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan yang berujung terjadinya tanah longsor dan sebagainya.

Dari analisis dampak tersebut menghasilkan sebuah informasi yang menyatakan bahwa apabila aktivitas pertambangan tersebut terus dilakukan, maka dampak negatif akan lebih banyak muncul dibandingkan dampak positif. Dampak yang ditimbulkan juga tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi, melainkan juga berdampak pada sektor sosial, lingkungan, politik hingga geografis. Aktor yang terkena dampak pun tidak hanya pemerintah, masyarakat dan pemilik izin pertambangan yang berkaitan dengan penambangan di pantai Jolosutro, tetapi seluruh masyarakat di Kabupaten Blitar dan bisa jadi masyarakat di yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Blitar. Hal ini akan menjadi permasalahan yang sangat berat bagi pemerintah Kabupaten Blitar kedepannya, sehingga pelaksanaan penambangan pasir besi tersebut perlu untuk dikaji ulang dan dipikirkan kembali.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, pengolahan data dan analisis data maka dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab secara singkat rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut.

1. Keluarnya izin pertambangan pasir besi operasi produksi no.503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/IX/2011 kepada pemilik perseorangan Edi Sampurna oleh pemerintah Kabupaten Blitar didasarkan atas pertimbangan yuridis berupa UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU no.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , PP no.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kementerian Lingkungan no.11 tahun 2006, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar tahun 2004-2014 dan tahun 2009-2028. Selain pertimbangan yuridis, pemerintah daerah Kabupaten Blitar juga berdasarkan pertimbangan ekonomi, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan retribusi. Adapun dari segi sosial adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar pantai Jolosutro, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang.
2. Dampak yang ditimbulkan dari keluarnya izin usaha pertambangan dipantai Jolosutro dapat dibedakan menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek yang ditimbulkan adalah kesejahteraan masyarakat sekitar pantai Jolosutro semakin membaik,khususnya yang bekerja di bidang pertambangan,tetapi di sisi lain sebagian penghasilan beberapa penduduk berkurang, terutama yang berprofesi sebagai nelayan dan pedagang di kawasan wisata pantai Jolosutro. Sedangkan dampak jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi adalah tercemarnya dan rusaknya lingkungan sekitar pantai Jolosutro, semakin menipis hingga habisnya komoditas pasir besi sehingga akan terjadi pemberhentian pekerja dalam skala besar serta terkikisnya dataran yang dimiliki Kabupaten Blitar sehingga terjadi penyempitan lahan.

b. Saran

Dari fenomena dan permasalahan sosial mengenai izin pertambangan yang menuai pro dan kontra tersebut, maka terdapat saran yang dapat ditawarkan, antara lain :

1. Bagi pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya Dinas Pertambangan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang hendaknya mengkaji kembali dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan produksi pasir besi di pantai Jolosutro dengan membandingkan jumlah pendapatan yang didapat.
2. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hendaknya segera melakukan revisi atas Peraturan Daerah (Perda) no.5 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Blitar dengan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar tahun 2004-2014 dan 2008-2028 dan melibatkan beberapa *stakeholder*. Hasil revisi Perda juga harus segera di sosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
3. Bagi pemilik izin (Edi Sampurna) hendaknya segera melengkapi persyaratan analisis dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan tuntutan warga, agar tidak terjadi kecurigaan dalam kehidupan sosial.
4. Bagi masyarakat pantai Jolosutro hendaknya tidak terprovokasi melakukan aksi anarkis, intimidasi dan terror kepada kelompok bersangkutan serta bersabar menunggu keputusan persidangan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Sulaiman. 2000. Pengantar Keuangan Negara dan Daerah. STIA LAN Press. Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny. 2005. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing. Surabaya.
- Islamy, Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Alumni. Bandung.
- Ragawino, Bewa. 2006. Hukum Administrasi Negara. Badan Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung.
- Salim Hs. 2006. Hukum Pertambangan Indonesia. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sri Mamudji. 2005. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3S. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2008. Analisa Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing. Malang

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Kepala Sub Bidang Pertambangan Umum

Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Blitar

Penelusuran Internet

Soal Pertambangan Pasir Besi Perlu Dikaji Ulang Bupati
Blitar(online)www.korantransaksi.com (10 januari 2013)